



MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA SECARA PSIKOMOTORIK UNTUK MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER NASIONAL

Ismiatun Maftuhah¹, M. Rahmadi Prayoga²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹, Fakultas Teknik², Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung
E-mail: ismiatunmaftuhah@gmail.com¹, muhammadrahmadiprayoga@gmail.com²

Abstract. Pancasila, as Indonesia's state ideology, is frequently taught through a purely cognitive approach in educational institutions, leading to a gap between theoretical understanding and practical daily behavior. This article analyzes the internalization of Pancasila values through the psychomotor domain to address this gap, focusing on action-based learning that integrates behavioral skills such as tolerance, communal work (gotong royong), and deliberation (musyawarah). Utilizing a normative research method, the analysis is based on the ideal principles of Pancasila as an ethical and legal norm, with a literature review encompassing national policy documents and current studies. The discussion highlights the dominance of the cognitive approach in the Civic Education (PKn) curriculum, its social impacts such as the low participation in gotong royong (BPS, 2023) and recommendations for integrating practical activities for each Pancasila principle. Findings indicate that psychomotor internalization can increase the effectiveness of character building by up to 60% (Universitas Negeri Jakarta, 2024). In conclusion, a holistic educational reform is necessary to realize Pancasila as the living soul of the nation, aligning with the Golden Indonesia 2045 vision. This article provides a normative contribution for policymakers and educators in strengthening national character education.

Keywords: Pancasila, Psychomotor, Tolerance, Normative, Character

Abstrak. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sering kali diajarkan secara kognitif di lembaga pendidikan, yang menyebabkan kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan perilaku sehari-hari. Artikel ini menganalisis internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui domain psikomotorik untuk mengatasi gap tersebut, dengan fokus pada pembelajaran berbasis aksi yang mengintegrasikan keterampilan perilaku seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Menggunakan metode penelitian normatif, analisis didasarkan pada prinsip-prinsip ideal Pancasila sebagai norma etis dan hukum, dengan tinjauan literatur dari dokumen kebijakan nasional dan studi terkini. Pembahasan menyoroti dominasi pendekatan kognitif dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dampak sosialnya seperti rendahnya partisipasi gotong royong (BPS, 2023), dan rekomendasi integrasi aktivitas praktis per sila Pancasila. Temuan menunjukkan bahwa internalisasi psikomotorik dapat meningkatkan efektivitas pembentukan karakter hingga 60% (Universitas Negeri Jakarta, 2024). Kesimpulannya, reformasi pendidikan holistik diperlukan untuk mewujudkan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang hidup, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Artikel ini memberikan kontribusi normatif bagi pembuat kebijakan dan pendidik dalam memperkuat pendidikan karakter nasional.

Kata Kunci: Pancasila, Psikomotorik, Toleransi, Normatif, Karakter

PENDAHULUAN

Pancasila, yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada 1 Juni 1945, bukan hanya sekadar dasar negara dan ideologi filosofis, melainkan panduan etis dan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai lima sila yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pancasila dirancang untuk membentuk karakter nasional yang harmonis, inklusif, dan

adil. Namun, dalam praktik pendidikan kontemporer, pengajaran Pancasila sering kali terjebak dalam paradigma kognitif, di mana siswa dan masyarakat difokuskan pada hafalan konsep dan pemahaman teoritis semata. Paradigma ini, yang telah berlangsung sejak era Orde Baru dan berlanjut hingga Kurikulum Merdeka Belajar 2022, menciptakan kesenjangan signifikan antara pengetahuan ideal dan implementasi perilaku nyata. Penting untuk ditegaskan bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, kearifan local, dan ajaran agama yang hidup dalam nusantara sejak berabad-abad¹.

Menurut Kemendikbudristek 2022², pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) lebih menekankan pada analisis konseptual, seperti interpretasi filosofis sila-sila, daripada pengembangan keterampilan perilaku. Akibatnya, meskipun mayoritas siswa mampu menguraikan nilai-nilai Pancasila secara verbal, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tetap rendah. Contohnya, survei Badan Pusat Statistik BPS, 2023³ mengungkapkan bahwa hanya 45% masyarakat urban yang aktif dalam kegiatan gotong royong, meskipun 80% responden mengklaim memahami sila ketiga secara konseptual. Fenomena ini semakin diperburuk oleh tantangan era digital, di mana individualisme dan polarisasi sosial melalui media sosial semakin mendominasi, sehingga nilai-nilai seperti toleransi (sila kedua) dan musyawarah (sila keempat) sering terabaikan.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila secara psikomotorik muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Domain psikomotorik, sebagaimana dijelaskan dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001)⁴, melibatkan keterampilan fisik dan perilaku yang dapat diamati, seperti melakukan tindakan kolaboratif atau berlatih dialog inklusif. Pendekatan ini menekankan pembelajaran berbasis aksi, di mana nilai-nilai Pancasila diubah menjadi kebiasaan melalui praktik berulang (*habituation*), selaras dengan konsep pendidikan karakter Aristoteles yang diadaptasi dalam konteks Indonesia modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana internalisasi psikomotorik dapat menjembatani gap tersebut, dengan harapan memberikan rekomendasi preskriptif bagi reformasi pendidikan. Pendekatan normatif dipilih karena Pancasila bersifat sebagai norma ideal yang harus menjadi acuan etis dan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dominasi Paradigma Kognitif dalam Pendidikan Pancasila: Mengapa pengajaran Pancasila di sekolah dan masyarakat masih terpusat pada hafalan dan pemahaman konseptual, sehingga menciptakan gap antara pengetahuan teoritis dan perilaku praktis?

¹ Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. hlm.2.

² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2022). Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>.

³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional: Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Gotong Royong dan Toleransi Sosial. BPS Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/15/..>

⁴ Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman

Hal ini bertentangan dengan norma pendidikan holistik yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional, di mana domain kognitif, afektif, dan psikomotorik harus seimbang.

Kurangnya Pembelajaran Berbasis Aksi dan Dampak Sosialnya: Bagaimana kurangnya integrasi domain psikomotorik menyebabkan rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi antaragama, gotong royong komunal, dan musyawarah demokratis? Data empiris dari Komnas HAM 2023 menunjukkan peningkatan kasus intoleransi, sementara BPS 2023 mencatat penurunan partisipasi sosial, yang secara normatif melanggar prinsip Pancasila sebagai norma etis bangsa⁵. Tantangan Internalisasi Psikomotorik di Era Kontemporer: Apa hambatan utama dalam menerapkan internalisasi psikomotorik, seperti keterbatasan fasilitas sekolah dan pengaruh globalisasi, serta bagaimana norma Pancasila dapat dijadikan acuan untuk mengatasinya? Rumusan ini menyoroti kebutuhan reformasi normatif untuk menjadikan Pancasila sebagai "open ideology" yang dinamis, sebagaimana dibahas dalam Deklarasi Pancasila 2023. Rumusan masalah ini bersifat normatif, karena berfokus pada pelanggaran prinsip ideal Pancasila dan kebijakan pendidikan, dengan tujuan mencari solusi preskriptif yang selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat analitis-preskriptif dan berorientasi pada prinsip-prinsip ideal hukum, etika, dan pendidikan tanpa melibatkan pengumpulan data empiris primer. Metode normatif dipilih karena topik internalisasi Pancasila melibatkan analisis norma dasar negara sebagai acuan etis yang harus diinternalisasi secara holistik, sesuai dengan pendekatan hukum normatif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2019). Pendekatan ini relevan untuk isu filosofis dan ideologis seperti Pancasila, di mana fokusnya adalah interpretasi prinsip-prinsip ideal untuk solusi sosial, bukan pengukuran empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada analisis normatif internalisasi nilai-nilai Pancasila secara psikomotorik, menyoroti akar masalah dari dominasi pendekatan kognitif, mekanisme penerapan yang direkomendasikan per sila, dan implikasi reformasi yang diperlukan untuk memperkuat karakter nasional. Analisis ini berpijak pada teori tri-domain pendidikan (kognitif, afektif, psikomotorik) dari Bloom, di mana domain psikomotorik berfungsi sebagai jembatan penting untuk mengubah pengetahuan teoritis menjadi perilaku nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Anderson dan Krathwohl 2001, psikomotorik melibatkan tingkatan seperti "melakukan" (doing) dan "mengadaptasi" (adapting), yang esensial untuk habituation atau pembiasaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2000), Hlm. 77.

Dominasi Paradigma Kognitif dan Gap Implementasi Struktural

Pertama, dominasi paradigma kognitif dalam pendidikan Pancasila menciptakan gap implementasi yang bersifat struktural dan mendalam. Menurut evaluasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Puskur, 2023, sebanyak 70% konten Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berorientasi pada hafalan sila dan analisis filosofis, sementara hanya 20% yang melibatkan aktivitas praktis. Kondisi ini secara normatif bertentangan dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional (Pasal 3), yang menuntut pengembangan potensi utuh peserta didik (holistik). Studi normatif yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 2023 memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa guru PKn sering terhambat oleh kurikulum yang kaku dan minimnya pelatihan yang memadai, sehingga siswa lulus dengan pemahaman teoritis tetapi minim keterampilan perilaku.

Dampak Sosial: Degradasi Nilai dan Krisis Aksi Komunal

Kedua, kurangnya pembelajaran berbasis aksi secara langsung memperburuk degradasi nilai nasional, memicu krisis aksi komunal yang melanggar prinsip-prinsip Pancasila. Data empiris BPS 2023 mencatat bahwa partisipasi gotong royong di kalangan milenial hanya 35%, suatu angka yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan paparan media sosial yang mempromosikan individualisme. Secara normatif, penurunan ini melanggar Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) sebagai norma persatuan, yang seharusnya diinternalisasi melalui aksi kolaboratif. Lebih jauh, dampak ini meluas ke Sila Pertama dan Sila Kedua, di mana Komnas HAM 2023 melaporkan peningkatan kasus intoleransi berbasis agama sebesar 15% pada 2022-2023, meskipun siswa mampu menguraikan nilai-nilai Pancasila secara konseptual. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan konseptual gagal menjadi penangkal perilaku intoleran tanpa adanya latihan psikomotorik dalam toleransi dan empati.

Solusi Normatif: Internalisasi Psikomotorik untuk Habituation

Untuk mengatasi kegagalan struktural ini, internalisasi psikomotorik harus diterapkan secara sistematis dan spesifik per sila, dengan mengubah nilai menjadi kebiasaan melalui metode aksi yang terintegrasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, 2023 menekankan bahwa tanpa psikomotorik, internalisasi ideologi hanya mencapai 40% efektivitas, karena nilai-nilai kompleks seperti musyawarah (Sila Keempat) memerlukan latihan negosiasi langsung untuk membangun kebiasaan bijaksana. Oleh karena itu, reformasi kurikulum harus berfokus pada domain "melakukan" (doing) dan "mengadaptasi" (adapting) sebagaimana dijelaskan dalam Taksonomi Bloom yang direvisi.

Rekomendasi Aksi Sila Pertama dan Kedua: Dialog dan Service Learning

Secara preskriptif, internalisasi Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dapat diwujudkan melalui program dialog antaragama di sekolah, di mana siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama, seperti berbagi cerita keagamaan untuk membangun

keterampilan toleransi. Kemendikbudristek 2024 merekomendasikan modul ini dengan menargetkan peningkatan empati hingga 50% melalui praktik rutin. Sementara itu, Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) diinternalisasi melalui proyek service learning, seperti kunjungan ke komunitas rentan atau kampanye anti-diskriminasi, yang melatih empati melalui tindakan fisik seperti distribusi bantuan. Universitas Negeri Jakarta 2024 menemukan bahwa pendekatan ini terbukti efektif mengurangi perilaku bullying di sekolah hingga 40%.

Rekomendasi Aksi Sila Ketiga dan Keempat: Gotong Royong dan Simulasi Deliberasi

Implementasi Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) memerlukan penekanan pada kegiatan gotong royong fisik dan kolaboratif, seperti pembersihan lingkungan atau proyek komunitas digital, yang secara langsung melatih kolaborasi antar-diversitas. BPS 2023 mendukung bahwa aksi fisik semacam ini dapat meningkatkan rasa persatuan, khususnya di lingkungan urban yang rentan terhadap individualisme. Untuk Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), solusinya adalah simulasi musyawarah menggunakan role-playing atau Virtual Reality (VR). Metode ini secara aktif mengembangkan keterampilan mendengarkan, negosiasi, dan kompromi yang merupakan inti dari demokrasi deliberatif, sebagaimana disarankan oleh Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 2023.

Rekomendasi Aksi Sila Kelima: Advokasi Keadilan Sosial

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) diinternalisasi melalui aksi advokasi dan program inklusi ekonomi. Contohnya termasuk penggalangan dana untuk UMKM atau program yang membiasakan siswa pada mekanisme distribusi adil dan penanggulangan ketimpangan sosial. Konsep ini sangat relevan dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, di mana BRIN 2023 menekankan peran psikomotorik dalam mengurangi ketimpangan secara aktif, bukan sekadar memahami konsep kemiskinan. Melalui aksi nyata ini, siswa tidak hanya belajar tentang keadilan, tetapi juga berlatih menciptakan keadilan.

Implikasi Reformasi Kebijakan dan Peningkatan Efektivitas

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa integrasi psikomotorik secara holistik dapat meningkatkan efektivitas pembentukan karakter hingga 60%. Implikasi reformasi kebijakan mencakup keharusan untuk pelatihan guru melalui sertifikasi khusus yang berfokus pada pedagogi aksi Kemendikbudristek, 2024. Selain itu, secara normatif diperlukan alokasi 40% waktu PKn untuk kegiatan berbasis aksi praktis. Reformasi ini esensial untuk mewujudkan Pancasila sebagai norma yang hidup (living soul of the nation), mencegah degradasi ideologi di tengah tantangan globalisasi, dan menjembatani gap antara kognisi dan perilaku.

Mewujudkan Pancasila sebagai Jiwa Bangsa yang Autentik

Pada akhirnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila secara psikomotorik adalah langkah normatif krusial. Ini bukan hanya pemenuhan kewajiban konstitusional, tetapi sebuah investasi strategis untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pembelajaran berbasis aksi, nilai-nilai Pancasila diubah dari sekadar konsep di buku teks menjadi kompetensi perilaku yang membentuk karakter nasional yang autentik dan dinamis, selaras dengan prinsip tri-domain Bloom dan norma UUD 1945.

Kontribusi Normatif untuk Pendidik dan Pembuat Kebijakan

Artikel ini memberikan kontribusi normatif yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan pendidik. Dengan mendiagnosis dominasi kognitif sebagai akar masalah yang menyebabkan dampak sosial negatif (seperti rendahnya gotong royong dan intoleransi), dan menawarkan rekomendasi preskriptif berupa model aksi psikomotorik per sila, penelitian ini menyediakan panduan yang langsung dapat diaplikasikan. Tujuannya adalah memperkuat pendidikan karakter nasional melalui reformasi pendidikan holistik, memastikan Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa yang hidup dan berfungsi sebagai jangkar etis di era kontemporer. Pertama, dominasi paradigma kognitif dalam pendidikan Pancasila menciptakan gap implementasi yang struktural.

Menurut evaluasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Puskur, 2023, 70% konten PKn berorientasi pada hafalan sila dan analisis filosofis, sementara hanya 20% yang melibatkan aktivitas praktis. Hal ini bertentangan dengan norma Undang-Undang Pendidikan Nasional (Pasal 3), yang menuntut pengembangan potensi utuh peserta didik. Studi normatif oleh Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 2023⁶ menemukan bahwa guru PKn sering terhambat oleh kurikulum yang kaku dan kurangnya pelatihan, sehingga siswa lulus dengan pemahaman teoritis tapi minim keterampilan perilaku. Dampaknya, seperti yang dilaporkan Komnas HAM 2023, kasus intoleransi berbasis agama meningkat 15% pada 2022-2023, meskipun siswa paham sila pertama secara konseptual.

Kedua, kurangnya pembelajaran berbasis aksi memperburuk degradasi nilai nasional. BPS 2023⁷ mencatat bahwa partisipasi gotong royong di kalangan milenial hanya 35%, dipengaruhi oleh urbanisasi dan media sosial yang mempromosikan individualisme. Secara normatif, ini melanggar sila ketiga Pancasila sebagai norma persatuan, yang seharusnya diinternalisasi melalui aksi kolaboratif. BRIN 2023⁸ dalam studinya tentang ideologi di era digital menekankan bahwa tanpa psikomotorik, internalisasi hanya mencapai 40% efektivitas, karena nilai-nilai seperti musyawarah (sila keempat) memerlukan latihan negosiasi langsung untuk membangun kebiasaan

⁶ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. (2023). "Implementasi Pendidikan Pancasila di Era Digital: Tantangan Psikomotorik dan Solusi Berbasis Aksi", Vol. 13, No. 2, hlm. 150-165.

⁷ Hasan, Zainudin, dkk. 2018. Pancasila: Nilai, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.

⁸ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). Studi Internalisasi Ideologi Pancasila di Era Digital: Analisis Normatif dan Rekomendasi. BRIN Press.

bijaksana. Untuk mengatasi ini, internalisasi psikomotorik harus diterapkan secara spesifik per sila, melalui metode aksi yang terintegrasi.

Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Latihan seperti program dialog antaragama di sekolah, di mana siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama, seperti berbagi cerita keagamaan. Ini membangun keterampilan toleransi, sebagaimana direkomendasikan Kemendikbudristek (2024)⁹ dalam modul Karakter Pancasila, yang menargetkan peningkatan empati hingga 50% melalui praktik rutin. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Proyek service learning, seperti kunjungan ke komunitas rentan atau kampanye anti-diskriminasi, melatih empati melalui tindakan fisik seperti distribusi bantuan. Universitas Negeri Jakarta 2024 menemukan bahwa pendekatan ini mengurangi perilaku bullying di sekolah hingga 40%. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Kegiatan gotong royong fisik, seperti pembersihan lingkungan atau proyek komunitas digital, yang melatih kolaborasi antar-diversitas. BPS 2023⁹ mendukung bahwa aksi ini dapat meningkatkan rasa persatuan di urban.

Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Simulasi musyawarah menggunakan role-playing atau VR, mengembangkan keterampilan mendengarkan dan kompromi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 2023¹⁰ menyarankan integrasi ini untuk memperkuat demokrasi deliberatif. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Aksi advokasi seperti penggalangan dana UMKM atau program inklusi ekonomi, yang membiasakan distribusi adil. Ini selaras dengan SDGs 2030, di mana BRIN 2023¹¹ menekankan peran psikomotorik dalam mengurangi ketimpangan.

Implikasi reformasi mencakup pelatihan guru melalui sertifikasi khusus Kemendikbudristek, 2024 dan alokasi 40% waktu PKn untuk aksi praktis. Secara normatif, ini mewujudkan Pancasila sebagai norma hidup, mencegah degradasi ideologi di tengah globalisasi. Untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi Pancasila di era modern, referensi dari jurnal Zainudin Hasan 2022¹² menekankan strategi pendidikan dalam membangun integritas anti-korupsi dan karakter generasi penerus bangsa sebagai wujud sila-sila Pancasila. Selain itu, buku 'Pancasila: Nilai, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern' karya Zainudin Hasan dkk 2018¹³ memberikan analisis komprehensif tentang sila-sila Pancasila dan relevansinya dalam konteks demokrasi Indonesia.

⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2024). Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Pancasila: Fokus Psikomotorik. Kemendikbudristek.

¹⁰ Ibid 1

¹¹ Ibid. 2

¹² Ibid 3.

¹³ Hasan, Zainudin. 2022. "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Karakter Universitas Bandar Lampung 7 (1): 12-28.

KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai Pancasila secara psikomotorik merupakan pendekatan normatif krusial untuk mengatasi gap antara pemahaman kognitif dan perilaku nyata, yang selama ini menghambat pembentukan karakter nasional. Melalui pembelajaran berbasis aksi yang holistik, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah dapat diubah menjadi kebiasaan berkelanjutan, selaras dengan prinsip tri-domain Bloom dan norma UUD 1945. Analisis menunjukkan bahwa dominasi kognitif telah menyebabkan dampak sosial negatif, tetapi integrasi psikomotorik dapat meningkatkan efektivitas hingga 60% (Universitas Negeri Jakarta, 2024). Rekomendasi utama meliputi reformasi kurikulum dengan modul aksi per sila, pelatihan pendidik, dan kampanye masyarakat berbasis kebijakan nasional. Secara keseluruhan, langkah ini bukan hanya kewajiban konstitusional, melainkan investasi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan visi Indonesia Emas 2045, di mana Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa yang autentik dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. hlm.2.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional: Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Gotong Royong dan Toleransi Sosial*. BPS Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/15/>.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). *Studi Internalisasi Ideologi Pancasila di Era Digital: Analisis Normatif dan Rekomendasi*. BRIN Press.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. hlm.2.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2018. *Pancasila: Nilai, Implementasi, dan Tantangan di Era Modern*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin. 2022. "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Karakter Universitas Bandar Lampung* 7 (1): 12-28.
- Ibid 1
- Ibid 1
- Ibid 3.
- Ibid. 2
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. (2023). "Implementasi Pendidikan Pancasila di Era Digital: Tantangan Psikomotorik dan Solusi Berbasis Aksi", Vol. 13, No. 2, hlm. 150- 165.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma,2000), Hlm.77.

***MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA SECARA PSIKOMOTORIK
UNTUK MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER NASIONAL***

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
(2022).

Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
(2022).

Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
(2024). Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Pancasila: Fokus
Psikomotorik. Kemendikbudristek.